

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian tentang keterlibatan Muhammadiyah dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diambil kesimpulan keterlibatan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan Institusional secara resmi mengambil peran dalam politik praktis Pilkada 2024 melalui program “Satu Daerah Satu CakadaMu” yang digagas oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat mengeluarkan surat rekomendasi secara resmi kepada pasangan calon pada Pilkada tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Kelembagaan Muhammadiyah yang memiliki struktur dari tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting hingga organisasi otonom ikut terlibat langsung dalam proses dukungan ini.

Muhammadiyah dalam Pilkada serentak sebagai kelompok kepentingan institusional menunjukkan adanya sebuah negosiasi dan lobi yang dilakukan pasangan calon dengan Muhammadiyah sendiri, tentu hal ini menimbulkan pro dan kontra baik di internal maupun di persyarikatan Muhammadiyah sendiri. Kesepakatan negosiasi dan lobi Muhammadiyah dengan calon pasangan yang

didukung meliputi kolaborasi di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan serta sampai kepada diaspora kader Muhammadiyah dalam pemerintahan.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan bukan hanya sekedar surat rekomendasi, Muhammadiyah sangat aktif dalam mengampanyekan pasangan calon yang didukung dengan membentuk tim sukses ad-hoc yang dalam tim itu melibatkan kader persyarikatan cabang, ranting, ortom, serta jaringan dakwah yang ada di Muhammadiyah. Sosialisasi dilakukan melalui pengajian, diskusi publik, dan terintegrasi di akar rumput. Strategi ini cukup membuat posisi Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang benar-benar mendukung calon melalui mekanisme kelembagaan yang terorganisir.

Partisipasi yang ditunjukkan oleh cabang, ranting serta otonom Muhammadiyah berlangsung secara aktif dan terstruktur. Muhammadiyah melibatkan dari bawah hingga wilayah dalam bentuk nyata dan memastikan keberhasilan pasangan calon yang di dukung oleh Muhammadiyah. Pimpinan cabang serta ranting yang langsung turun lapangan untuk mendukung dan juga organisasi otonom seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan lainnya.

Surat rekomendasi dan dukungan yang diberikan Muhammadiyah sebagai bentuk keterlibatan Muhammadiyah pada kenyataan cukup memberikan pengaruh yang signifikan dengan data yang di dapatkan oleh peneliti bahwasannya dari 14 pasangan calon yang di rekomendasikan, 7 berhasil terpilih. Hal ini menandakan kapasitas jaringan sosial dan legitimasi moral yang dimiliki Muhammadiyah mampu mempengaruhi arah politik lokal melalui pendekatan dakwah-politik yang khas. Walaupun begitu, hasil penelitian di sini Muhammadiyah masih terlalu tergesa-gesa untuk ikut andil dalam politik praktis Pilkada ini, dikarenakan masih banyaknya terdapat ketidaksepakatan bahkan sampai kepada intervensi dari internal sendiri.

## 6.2 Saran

Berdasarkan data yang didapat peneliti mengenai keterlibatan Muhammadiyah dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, dan juga kesimpulan pada penelitian ini, berikut beberapa saran yang bisa diberikan oleh peneliti dalam bentuk saran akademis dan praktis.

1. Penelitian selanjutnya bisa mengkaji mengenai dampak jangka panjang dari keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis dalam konteks organisasi masyarakat Islam. Khususnya bagaimana Muhammadiyah ini mempengaruhi kualitas pemerintahan dan kebijakan publik setelah pemilihan kepada daerah.

2. Peneliti berikutnya dapat mengkaji kompratif antara Muhammadiyah dengan organisasi masyarakat Islam lainnya dalam konteks peran politik lokal untuk melihat gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kelompok kepentingan di Indonesia.
3. Peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait bagaimana bentuk mekanisme internal dalam pengambilan keputusan di Muhammadiyah terkait politik praktis yang dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di tingkat daerah, serta dampaknya kepada konsolidasi organisasi.

**a. Saran Praktis**

1. Muhammadiyah perlu meningkatkan mekanisme komunikasi serta koordinasi antara pimpinan wilayah dan pimpinan daerah untuk menghindari potensi konflik dan perpecahan pendapat terkhususnya dalam proses pemberian dukungan calon kepala daerah. Selain itu, musyawarah yang inklusif dan transparan harus diutamakan sebagai upaya menjaga pesatuan dan integritas organisasi.
2. Dalam pemberian rekomendasi, Muhammadiyah sebaiknya lebih memperhatikan dan tegas dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam program “Satu Daerah Satu CakadaMu” agar memastikan pasangan calon yang didukung benar-benar mampu

dan memiliki komitmen mengabdikan kepada masyarakat serta mendahulukan kepentingan masyarakat.

3. Adanya penguatan edukasi politik dan pemahaman dasar kader, anggota, serta warga persyarikatan terkait peran dan tanggungjawab Muhammadiyah dalam politik praktis agar dapat berpartisipasi secara sadar dan etis, dan tidak menghilangkan prinsip dan nilai dakwah Muhammadiyah.

